

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Masyarakat mengharapkan profesi akuntan publik dapat melakukan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi dan Puradiredja, 1998:3). Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Profesi akuntan publik ini mempunyai ciri yang berbeda dengan profesi-profesi lain yang juga menyediakan jasa bagi masyarakat. Walaupun akuntan publik memperoleh honor dari klien untuk menjalankan keahliannya, namun seorang auditor harus tetap independen dan tidak memihak kliennya (Mulyadi dan Puradiredja, 1998:27) agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Belakangan ini profesi akuntan publik kembali menjadi sorotan di masyarakat internasional, yaitu dengan timbulnya skandal kebangkrutan Enron, yang merupakan salah satu perusahaan energi dan perdagangan derivatif energi terbesar di Amerika Serikat (Media Akuntansi, 2002:23). Skandal Enron yang melibatkan auditor Arthur Andersen, manajemen Enron telah melakukan *window dressing* dengan cara menaikkan pendapatannya senilai US \$600 juta dan menyembunyikan hutangnya sebesar US \$ 1,2 miliar dengan teknik *off-balance sheet* (Sudirman Said: 2002).

Auditor Enron, Arthur Andersen dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa laporan keuangan selama bertahun-tahun. Arthur Andersen memperoleh \$25 juta dalam biaya audit (*audit fee*) dan \$27 juta dalam biaya konsultasi dari Enron.

Di lihat dari kasus Enron tersebut, *fee audit* yang diberikan Enron kepada auditor Arthur Andersen tidaklah kecil yaitu sebesar \$25 juta. Tetapi karena keserakahan (*greed*) Arthur akan uang yang lebih banyak dari itu, Arthur menjadi tidak independen dalam melakukan profesinya sebagai auditor.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “**HUBUNGAN AUDIT FEE DENGAN INDEPENDENSI AUDITOR**”. Dimana penulis membatasi sistem penerapan *audit fee* berdasarkan sumber dari Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor :Kep.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *fee audit*.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian yang di kemukakan di atas maka identifikasi masalahnya adalah :

1. Apakah sistem penerapan *audit fee* yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor:Kep.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *fee audit* telah diterapkan di Kantor Akuntan Publik secara memadai?
2. Apakah *audit fee* akan berhubungan dengan independensi auditor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem penerapan *audit fee* yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor: Kep.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *fee audit* telah diterapkan secara memadai.
2. Untuk mengetahui adanya hubungan antara *audit fee* dengan independensi auditor.

1.4. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu :

1. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Kantor Akuntan Publik untuk meningkatkan kinerja para auditor. Dan diharapkan juga bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan dalam memilih dan merekrut auditor-auditor yang bukan hanya memiliki kemampuan (*skill*) yang memadai saja, tetapi memiliki sikap independensi yang harus dipertahankan oleh auditor tersebut.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk dapat menambah wawasan tentang profesi auditor dan diharapkan juga dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.